

BAB IV

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini, penulis berusaha menganalisis proses pembentukan kebijakan luar negeri Indonesia ke Myanmar terkait krisis kemanusiaan Rohingya. Hal ini dirasa penting untuk dikaji karena kebijakan luar negeri ini erat kaitannya dengan hubungan antara negara Indonesia dengan negara lainnya (pada kasus ini Myanmar), sehingga semua keputusan yang dilakukan pemerintah Indonesia pasti memiliki konsekuensi dan harus diperhitungkan secara matang. Dengan melihat pada teori dan analisis yang telah dibuat di dalam penelitian, penulis menemukan tiga poin penting yang mampu menjelaskan proses pembentukan kebijakan tersebut.

Poin pertama, penulis menemukan bahwa proses pembentukan kebijakan Indonesia terkait krisis kemanusiaan Rohingya dapat dilihat pada tingkat kompetensi pemerintah Indonesia sebagai aktor pengambil keputusan. Pada poin ini, penulis menemukan bahwa Pemerintah Indonesia telah menggunakan perangkat aturannya secara maksimal dan mengedepankan pada relevansi dan ketepatan guna dalam mencapai tujuannya. Hal ini dapat terlihat pada penerapan nilai politik luar negeri bebas-aktif Indonesia yang dirasa mampu menjadi pedoman bagi pemerintah Indonesia di dalam proses pembentukan kebijakan luar negerinya terkait krisis kemanusiaan Rohingya. Kemudian kompetensi pemerintah Indonesia juga dilihat pada hubungan antara aktor *Superior* dan *Subordinate* di dalam pemerintahan Indonesia yang sudah terjalin dengan baik. Hal ini terlihat pada bagian analisis, dimana Joko Widodo

(Superior) mampu menyatakan permasalahan Rohingya sebagai isu internasional dan menginstruksikan Menteri Luar Negerinya (Subordinate) untuk menemui pihak Myanmar yang kemudian dilaksanakan dengan sebaik mungkin dan penuh dengan tanggung jawab. Kemudian tingkat kompetensi ini juga dilihat pada unit analisis Indonesia (Kementerian Luar Negeri) yang memiliki fungsi dan spesifikasi kemampuan dalam bidang urusan luar negeri. Terakhir, dalam melihat kompetensi pemerintah Indonesia, harus melihat juga pada sifat partisipasinya, dimana pemerintah Indonesia sendiri memiliki unit analisis tersendiri dalam membentuk kebijakan luar negerinya, yaitu Kementerian Luar Negeri, yang kemudian diberikan wewenang oleh Presiden Joko Widodo untuk turut serta membentuk kebijakan terkait krisis kemanusiaan Rohingya, dan dibantu dengan peran penasihat di dalamnya.

Poin kedua, penulis juga menemukan bahwa komunikasi dan informasi merupakan hal yang penting bagi pemerintah Indonesia dalam membentuk kebijakan luar negerinya. Komunikasi sendiri dirasa penting karena merupakan kebutuhan dasar bagi pemerintah Indonesia dalam mengumpulkan informasi dengan menekankan kepada persamaan pemahaman dan bahasa (harfiah maupun kiasan) di dalamnya, sehingga proses pembentukan kebijakan luar negeri ke Myanmar dapat terintegrasi dengan baik. Kemudian penulis juga menemukan bahwa sangat penting bagi pemerintah Indonesia dalam memiliki karakter spesifik terhadap komunikasi yang dilakukan. Hal ini berkaitan dengan bagaimana pemerintah Indonesia mampu menyampaikan sebuah informasi dengan makna yang melekat di dalamnya, dan

pemilihan kata yang ingin disampaikan dengan lawan bicaranya, sehingga pembentukan kebijakan luar negerinya terkait krisis kemanusiaan Rohingya dapat dieksekusi dengan baik. Kemudian jika mengacu pada arus informasi, dapat terlihat bahwa informasi memang dijadikan alat analisis bagi pemerintah Indonesia untuk menyaring informasi sebanyak mungkin yang berkaitan dengan persoalan Rohingya. Adapun instrumen yang digunakan pemerintah Indonesia dalam mendapatkan informasi, yaitu menggunakan komunikasi secara lisan maupun tertulis. Selain itu penulis juga menemukan bahwa dalam mendapatkan membentuk kebijakan luar negeri, pemerintah Indonesia harus memperhatikan pada komponen penting di dalamnya yaitu, informasi yang berkaitan dengan tujuan dibentuknya kebijakan tersebut, informasi yang berkaitan dengan efisiensi dan pemeliharaan.

Pada poin kedua, penulis juga menemukan bahwa proses pembentukan kebijakan luar negeri Indonesia ini erat kaitannya dengan arus komunikasi dan informasi yang harus dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Mengacu pada arus komunikasi, hal ini dapat terlihat pada pentingnya persamaan pemahaman dan bahasa yang kemudian digunakan oleh pemerintah Indonesia dalam proses pembentukan kebijakannya terhadap Myanmar dalam membahas masalah krisis kemanusiaan Rohingya. Kemudian penulis juga menemukan pentingnya karakter spesifik yang harus dimiliki oleh aktor pengambilan di Indonesia, karena hal ini akan sangat mempengaruhi proses pembentukan kebijakannya. Pembahasan mengenai arus komunikasi dan informasi ini kemudian didukung oleh konsep pendukung yaitu, FPA

yang membahas mengenai adanya hubungan timbal balik yang terjadi antara aktor pengambil keputusan.

Terakhir, poin ketiga, penulis menemukan bahwa proses pembentukan kebijakan Indonesia terkait krisis kemanusiaan Rohingya juga dapat terlihat pada motivasi yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Hal ini termasuk di dalamnya membahas mengenai motivasi pemerintah Indonesia berdasarkan urgensinya dalam mencapai tujuannya.. Pada bagian analisis telah dijelaskan bahwa urgensi pemerintah Indonesia dalam kasus yang bersangkutan disebabkan oleh karena faktor kemanusiaan, dimana kejadian tersebut, disikapi oleh pemerintah Indonesia sebagai aksi pelanggaran HAM sehingga harus segera dicarikan solusi. Kemudian penulis juga menemukan bahwa motivasi pemerintah Indonesia dalam proses pembentukan kebijakan luar negeri ini didasari oleh norma dan aturan yang ada di dalam negaranya. Selain daripada itu, poin motivasi ini juga didukung oleh konsep FPA, yang sama dengan poin pertama, membahas mengenai pentingnya peran manusia di dalam membentuk kebijakan luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Breuning, Marijke. *Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction*. New York: Palgrave Macmillan, 2007.

Cooney, Kevin. *Human Rights Watch World Report 1992: Events of 1991*. New York: Human Rights Watch, 1991.

Creswell, John. *Research Design: Qualitative, Quantitatives and Mixed Methods Approaches*. California: Sage Publication, 2014.

Hermann, Margareth. *“Who Becomes a Leader?. Some Societal and Regimes Influneces on Selection of a Head of State*. Colorado: Westview Press, 1974.

Holzgrefe, J. L. and Keohane, Robert O. *Humanitarian Intervention: Ethical, Legal, and Political Dilemmas*. UK: Cambridge University Press, 2003.

Ibrahim, Azeem. *The Rohingyas Inside Myanmar’s Hidden Genocide*. United Kingdom: C. Hurst& Co., 2016.

Knupfer, Nancy Nelson and Hilary McLellan. *Handbook of Research for Educational Communications and Technology*, ed. David H. Jonassen. New York: Simon & Schuster Macmillan, 1996.

Salmon, Trevor C. and Mark F. Imber. *Issues in International Relations: Second Edition*. New York: Routledge, 2008.

Smith, Steve, Amelia Hadfield, and Tim Dunne. *Foreign Policy : Theories, Actors, Cases*. Oxford: Oxford University Press, 2012.

Snyder, Richard C. and Burton Sapin. *Foreign Policy Decision-Making*. New York: Palgrave Macmillan, 2002

WEBSITE

“*Background Information on the Responsibility to Protect.*” UN. Accessed on September 7, 2018.
<http://www.un.org/en/preventgenocide/rwanda/about/bgresponsibility.shtml>.

- “*BANGLADESH FACTSHEET*,” UNHCR. Accessed on October 20, 2018.
<https://www.unhcr.org/protection/operations/50001ae09/bangladesh-factsheet.html>
- “*BURMA/BANGLADESH BURMESE REFUGEES IN BANGLADESH: STILL NO DURABLE SOLUTION*.” HRW. Accessed on October 10, 2018.
<https://www.hrw.org/reports/2000/burma/index.htm>
- “*INDONESIA’S FOREIGN POLICY/THE PRINCIPLES OF THE FOREIGN POLICY*,” EORI. Accessed on November 19, 2018
<https://www.embassyofindonesia.org/index.php/foreign-policy/>
- “Menlu RI Serahkan Usulan Formula 4+1 untuk Rakhine State kepada State Counsellor Myanmar,” KLNRI, Accessed on 7 December, 2018.
<https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Menlu-RI-Serahkan-usulan-Formula-41-untuk-Rakhine-State-kepada-State-Counsellor-Myanmar.aspx>
- “*Myanmar: A New Muslim Insurgency in Rakhine*.” ICG. Accessed on October 15, 2018.
<https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/283-myanmar-a-new-muslim-insurgency-in-rakhine-state.pdf>
- “*Persecution of the Rohingya in Burma/Myanmar and the Responsibility to Protect*.” Global Centre for the Responsibility to Protect. Accessed on October 21, 2018.
<http://www.globalr2p.org/media/files/2015-march-burma-brief-1.pdf>
- “*ROHINGYA BRIEFING REPORT*.” ERT. Accessed on October 2, 2018,
<http://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/Rohingya%20Briefing%20Report.pdf>.
- “*Rohingya Crisis in Myanmar*.” CFR. Accessed on August 31, 2017,
<https://www.cfr.org/interactives/global-conflict-tracker#!/conflict/rohingya-crisis-in-myanmar>.
- “Sasaran Strategis Kementerian Luar Negeri,” KLNRI. Accessed on November 24, 2018.
<https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/landasan-visi-misi-polugri/Pages/Sasaran-Strategis-Kementerian-Luar-Negeri.aspx>
- “*The Constitution of the Union of Burma, 24 September 1947, Effective 4 January 1948*,” ILO. Accessed on October 16, 2018.
<https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/79573/85699/F1436085708/MMR79573.pdf>

“*The Government Could Have Stopped This.*” Sectarian Violence and Ensuing Abuses in Burma’s Arakan State.” HRW. Accessed on October 9, 2018 <https://www.hrw.org/reports/2000/burma/burm005-01.htm>

“*The Rohingya.*” Harvard University. Accessed on October 10, 2018 <https://rlp.hds.harvard.edu/faq/rohingya>

“*Treaty of Yandaboo, 24 February 1826.*” AT. Accessed on October 6, 2018. <https://www.assamtimes.org/sites/default/files/yandaboo-treaty.pdf>

“*What are Human Rights?.*” OHCHR. Accessed on August 31, 2017, <http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx>

Abdelkader, Engy “*The history of the persecution of Myanmar’s Rohingya.*” The Conversation. Accessed on October 8, 2018. <https://theconversation.com/the-history-of-the-persecution-of-myanmars-rohingya-84040>

Kiragu, Esther, Angela Li Rosi, and Tim Morris. “*States of denial A review of UNHCR’s response to the protracted situation of stateless Rohingya refugees in Bangladesh.*” UNHCR. Accessed on October 18, 2018. <http://www.unhcr.org/4ee754c19.pdf>

Lowenstein, Allard K. “*PERSECUTION OF THE ROHINGYA MUSLIMS: IS GENOCIDE OCCURRING IN MYANMAR’S RAKHINE STATE?.*” Belfast: Fortify Rights. Accessed on October 13, 2018. [https://www.fortifyrights.org/downloads/Yale Persecution of the Rohingya October 2015.pdf](https://www.fortifyrights.org/downloads/Yale%20Persecution%20of%20the%20Rohingya%20October%202015.pdf)

Smith, Matthew. “*All You Can Do is Pray*” *Crimes Against Humanity and Ethnic Cleansing of Rohingya Muslims in Burma’s Arakan State.* New York: Human Rights Watch. Accessed on October 16, 2018. https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/burma0413_FullForWeb.pdf

REPORT

Antoine, Bernard. “*Burma repression, discrimination and ethnic cleansing in Arakan.*” Paris: International Federation of Human Rights Leagues. 1999.

Green, Penny, Thomas MacManus, and Alicia de la Cour Venning. “*COUNTDOWN TO ANNIHILATION: GENOCIDE IN MYANMAR.*” ISCI. 2015.

JURNAL

Abdelkader, Engy. “MYANMAR’S DEMOCRACY STRUGGLE: THE IMPACT OF COMMUNAL VIOLENCE UPON ROHINGYA WOMEN AND YOUTH”. Pacific Rim Law & Policy Journal Association. 23 (2014)

Chan, Aye. “The Development of a Muslim Enclave in Arakan (Rakhine) State of Burma (Myanmar).” SOAS Bulletin of Burma Research. 3, no. 2 (2005)

Hasan, Hidayat, Muh & Yudarsan Akbar, Muhammad. “Addressing the Rohingya Problem THE RELEVANCE OF NON-INTERFERENCE PRINCIPLE IN ASEAN (STUDY CASE: ROHINGYA).” International Journal of Management and Applied Science 3, no. 3 (2017)

Hatta, M., INDONESIA BETWEEN THE POWER BLOCS. *Foreign Affairs*. 36, No. 3 (1958)

Hudson, Valerie M. *Foreign Policy Analysis: Actor-Specific Theory and the Ground of International Relations*. 1, no. 1-30 (2005)

Ibrahim, Hariati, and Rohaida Nordin. *The Principle of Responsibility to Protect: The Case of Rohingya in Myanmar*. International Islamic University Malaysia. (2015)

“INDONESIA AND THE ROHINGYA CRISIS” IPAC. 46 (2018)

Kipgen, Nehginpao. “Addressing the Rohingya Problem.” Journal of Asian and African Studies . 49, no 2 (2014).

Kipgen, Nehginpao. “Conflict in Rakhine State in Myanmar: Rohingya Muslims’ Conundrum”. Journal of Muslim Minority Affairs. 33 (2013)

Shakila Devi, Konsam, “Myanmar under the Military Rule 1962-1988.” International Research Journal of Social Sciences. 3, No. 10 (2014)

BERITA

“Bahas Rohingya, Menteri Retno ke Myanmar Temui Aung San Suu Kyi,“ Accessed on 7 December, 2018. <https://nasional.tempo.co/read/905637/bahas-rohingya-menteri-retno-ke-myanmar-temui-aung-san-suu-kyi/full&view=ok>

- “Di depan Kedutaan Myanmar, demonstran kecam 'kejahatan terhadap Rohingya',” Accessed on 5 December, 2018. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41134150>
- “Persecution of Rohingyas; Timeline of conflict,” Accessed on October 10, 2018. <https://en.dailypakistan.com.pk/world/persecution-of-rohingyas-timeline-of-conflict/>
- “Rohingya face Myanmar 'ethnic cleansing': UN official.” Accessed on October 20, 2018. <https://www.aljazeera.com/news/2016/11/rohingya-face-myanmar-ethnic-cleansing-official-161125065731036.html>
- Hickey, Michael. “The Burma Campaign 1941 - 1945.” Accessed on October 9, 2018. http://www.bbc.co.uk/history/worldwars/wwtwo/burma_campaign_01.shtml
- Hidayat, Fariq. “Ini Pernyataan Lengkap Jokowi Soal Krisis Kemanusiaan Rohingya.” Accessed on September 7, 2018. <https://news.detik.com/berita/3626813/ini-pernyataan-lengkap-jokowi-soal-krisis-kemanusiaan-rohingya>.
- Hossain, Mohammad Ponir. “Timeline: Being Rohingya in Myanmar, from 1784 to Now.” Accessed on October 12, 2018. <https://thewire.in/external-affairs/rohingya-myanmar-timeline>
- Lone, Wa dan Shoon Naing. “At least 71 killed in Myanmar as Rohingya insurgents stage major attack.” Accessed on October 20, 2018. <https://www.reuters.com/article/us-myanmar-rohingya/at-least-71-killed-in-myanmar-as-rohingya-insurgents-stage-major-attack-idUSKCN1B507K>
- Nadlir, Moh. “Bantuan dan Pertolongan Indonesia untuk Etnis Rohingya di Myanmar,” Accessed on 5 December, 2018. <https://regional.kompas.com/read/2017/09/03/16003361/bantuan-dan-pertolongan-indonesia-untuk-etnis-rohingya-di-myanmar>
- Ratna, Dewi. “4 Unsur penting dalam negara, Indonesia sudah punya belum ya?”. Accessed on August 31, 2017. <https://www.merdeka.com/pendidikan/4-unsur-penting-dalam-negara-indonesia-sudah-punya-belum-ya.html>
- Safi, Michael. “Myanmar treatment of Rohingya looks like 'textbook ethnic cleansing', says UN.” Accessed on October 22, 2018. <https://www.theguardian.com/world/2017/sep/11/un-myanmars-treatment-of-rohingya-textbook-example-of-ethnic-cleansing>